



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 940/IV/XII/2016

**Komisi V DPR RI Apresiasi Bandara Sentani
Layani Masyarakat Songsong Natal
dan Tahun Baru**

**Semangat Gotong Royong
Tangani Gempa Aceh
Luar Biasa**

**Komisi III DPR RI Tak Setujui
Dua Calon Hakim Ad Hoc di MA**



Komisi V DPR RI Apresiasi Bandara Sentani Layani Masyarakat Songsong Natal dan Tahun Baru

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena apresiasi Bandara Sentani yang telah melayani masyarakat dalam menyongsong Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Apresiasi tersebut disampaikan saat tim meninjau Bandara Sentani di Papua, Selasa (13/12). Tim didampingi Dirjen Perhubungan Udara Soeryatno, Kepala Otoritas Bandara Sentani Agus Priyanto, Kepala Basarnas Suyatno, Ketua BMKG, Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLT) Victor Subroto.

“Komisi V DPR RI dapat memahami psikologis BMKG mengingat wilayah Papua ini sangat rawan dengan kecelakaan udara, dimana pada tahun ini saja ada beberapa kali kecelakaan pesawat sampai memakan korban jiwa.” kata Michael Wattimena di ruang rapat Bandara Sentani.

“Kita akan melihat infrastruktur persiapan baik utama maupun penunjang dalam rangka mensukseskan Natal dan Tahun Baru. Dan kita akan melihat ruas jalan sebagai akses sarana yaitu bandara. Kita mau melihat sejauh mana kesiapan keamanan, kesiapan keselamatan dan kualitas penerbangan,” tambah politisi Demokrat ini.

Kepada Tim DPR RI, Kepala Angkasa Pura Sentani Agus Priyanto, menjelaskan persiapan menyambut Natal dan Tahun baru 2017 di Bandara Sentani Jayapura. “Kami melaksanakan Posko Anggota Natal dan Tahun Baru dimulai tanggal 18 bulan Desember dan berakhir tanggal 8 bulan Januari 2017.

Prediksi puncak angkutan akan terjadi tanggal 23 Desember sedangkan arus baliknya tanggal 6 Januari 2017. “Ini adalah kesiapan informasi yang akan kita berikan bagi masyarakat. Sementara Operator penerbangan yang beroperasi di bandara Sentani antara lain Garuda, Batik, Pelangi, Wings, Sriwijaya, dan City Link, Lion, Susi, dan Trigana,”



Tim Kunspek Komisi V DPR RI berdialog dengan penumpang, saat meninjau Bandara Sentani di Papua

ujarnya.

Secara rinci dia juga menjelaskan prediksi jumlah penumpang berikut kesiapan armada serta langkah pengamanan yang dilakukan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang ditunjang dengan didirikannya sejumlah posko. Yang tak kalah penting, pihaknya selalu berkomunikasi dengan pihak terkait sehingga bila timbul masalah segera bisa ditangani dengan cepat.

Ketua Tim Kunspek Michael Wattimena menyambut baik langkah-langkah persiapan instansi terkait termasuk lonjakan penumpang yang sudah diantisipasi. Dinas

Perhubungan, Basarnas, BMKG dan Angkasa Pura serta pihak terkait lainnya sudah menyiapkan transportasi dengan baik.

“Sudah banyak langkah-langkah dilakukan instansi terkait. Satu hal diingatkan, bila ada kerusakan *runway* harus segera diatasi karena akan terjadi kepadatan lalu lintas penerbangan. Jangan sampai sarana dan prasarana bandara rusak sehingga menimbulkan *chaos* di bandara dan menghambat masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya harap penambahan *extra flight* tidak menimbulkan kekacauan,” ia menambahkan. ■

(brmp). Foto: Ekadhr

Spirit Maulid Nabi Harus Di Implementasikan di Kehidupan Nyata

Ketua DPR RI Setya Novanto dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau lebih dikenal dengan Maulid Nabi mengatakan momentum tersebut harus dijadikan contoh dan tauladan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dirayakan secara *ceremony* semata. Hal itu diungkapkan dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin, (12/12).

“ Kita peringati sebagai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang biasa disebut Maulid Nabi. Maulid Nabi sebaiknya tidak hanya dirayakan secara *ceremony* semata, tapi harus dijadikan contoh dan tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari,” ujar Setnov, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini mengatakan, kelahiran Nabi Muhammad SAW telah mengubah perilaku umat manusia yang saat itu didominasi sifat jahiliyah. Kelahirannya pun menginspirasi masyarakat kala itu dengan sosok yang sederhana, pekerja keras, memberi solusi atas berbagai persoalan. Nabi Muhammad SAW juga merupakan pemimpin yang dekat dengan umatnya.

"Kehadiran Nabi Muhammad SAW di dunia ini telah mengubah perilaku umat manusia yang sedang didominasi oleh sifat-sifat jahiliyah (kebodohan). Nabi Muhammad SAW menginspirasi kita sebagai sosok manusia sederhana, pekerja keras, figur yang menaungi, menyejukkan, mencerahkan, memberi solusi atas berbagai persoalan, sekaligus pemimpin yang sangat dekat dengan umatnya," tutur Setnov.

Kepemimpinan Nabi Muhamamd SAW mampu menyatukan kemajemukan,



Ketua DPR RI Setya Novanto

perbedaan agama, suku dan ras sebagai kekuatan kehidupan masyarakat, seperti yang dilakukan pada masyarakat kota Madinah. "Madinah yang dihuni masyarakat multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam, akhirnya mampu hidup damai dan berdampingan setelah ditata, dibangun dan dipimpin oleh

Rasulullah SAW, sehingga menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat Islam dan Barat sekalipun," terangnya.

Setnov melihat dan merasakan bahwasanya Indonesia ini sama halnya seperti Madinah, dimana kebhinekaan bukan menjadi pemecah, tapi justru menjadi pemersatu seluruh elemen bangsa dan negara kita. "Saya sangat setuju dan sependapat dengan pemikiran Presiden Joko Widodo, bahwasanya kemajemukan yang ada di Indonesia berupa ratusan suku dan ribuan bahasa daerah serta perbedaan agama atau keyakinan di Indonesia, adalah modal utama kesatuan dan persatuan kita," ujar Setnov.

Ketua Umum Golkar ini juga mengajak masyarakat untuk terus mengingat Rasulullah SAW dan bershalawat kepadanya agar spirit Nabi Muhammad SAW dapat

ditularkan kepada masyarakat saat ini "Saya mengajak kita semua untuk setiap saat mengingat Rasulullah SAW, menjunjungnya, kita selalu bershalawat padanya, agar teladan yang diwariskannya senantiasa hidup hingga akhir hayat kita, bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara kita," tutup Setnov. ■

(b.m.p), Foto: Andri/br

BULETIN PARLEMENTARIA



PENAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpri.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE, M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji, Lamin, Arif Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) [ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN]

Pemimpin Nasional Diminta Teladani Akhlak dan Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal, Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon mengajak bangsa Indonesia, khususnya para pemimpin nasional untuk meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Hal itu disampaikan dalam rilis yang diterima Parlemen, Senin, (12/12).

Fadli menilai dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW tidak saja sebagai pemimpin agama, namun juga sebagai negarawan yang patut diteladani. "Menyimak perjalanan sejarahnya, Nabi Muhammad SAW bukan saja sebagai pemimpin agama, namun juga contoh seorang negarawan yang handal. Beliau adalah sosok panutan paripurna yang patut diteladani, baik akhlak maupun kepemimpinannya," ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini menilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW ditopang oleh empat karakter unggul yaitu benar (shidiq), dipercaya (amanah), cerdas (fathonah) dan menyampaikan (tabligh).

"Empat karakteristik inilah yang menjadi pondasi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Di atas pondasi tersebut, bukan saja keshalehan pribadi yang beliau bangun, namun juga



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon

keshalehan kolektif, yang berwujud pada bangunan masyarakat yang sejahtera," terang Fadli.

Fadli menilai keempat karakter tersebut jika diterapkan dalam kepemimpinan nasional menjadi sangat relevan untuk memecahkan problem nasional yang tengah dihadapi. "Empat karakter tersebut, jika

diterapkan dalam kepemimpinan nasional, tentunya juga sangat relevan untuk memecahkan problem nasional yang tengah dihadapi, seperti lunturnya etika dalam interaksi sosial, kurangnya kesadaran mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa, dan

rapuhnya kedaulatan negara," ujarnya.

Selain mengajak untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, Fadli Zon juga mengajak umat Islam agar momentum Maulid Nabi dapat meningkatkan ukhuwah Islamiyah, persatuan, kesatuan, dan kecintaan kepada bangsa dan negara. ■

(b.w.m/p), Foto: Anadi/br

Fadli Zon Pererat Kerjasama DPR RI - Parlemen Brazil

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dan Duta Besar RI untuk Brazil Toto Riyanto melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Brazil H.E. Mr. Waldir Maranhão di Ruang Kerjanya Kompleks Parlemen Brazil, Selasa, (13/12).

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia sudah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia - Brazil dan sudah lama berdiri. "GKSB Indonesia - Brazil merupakan wadah bagi parlemen kedua negara untuk saling bekerjasama dan bertukar pikiran. Sehingga kedua negara bisa saling belajar untuk kemajuan masing-masing negara selain meningkatkan hubungan antara kedua masyarakat," ujar Fadli Zon.

Menurut Fadli Zon, antara Parlemen Indonesia - Brazil sudah dibuat draf *MoU* untuk saling bekerjasama sejak 2013. Hanya

tinggal menunggu waktu untuk ditandatangani oleh Ketua DPR RI Indonesia dan Ketua DPR Brazil. Dia berharap Ketua DPR Brazil dan Mr. Waldir dapat berkunjung ke Indonesia.

"Kami harap, Ketua DPR Brazil dan juga Mr. Waldir dapat berkunjung ke Indonesia. Akan kami sambut dengan hangat, sekaligus kita tandatangi perjanjian kerjasama antara parlemen Indonesia dengan Brazil," kata Fadli Zon.

Selain itu, dalam diskusi yang berlangsung dengan hangat tersebut, Mr. Waldir juga menceritakan geliat politik di Brazil, termasuk sistem Pemilu dan

pendanaan partai politik.

"Di Brazil, hampir sama dengan negara demokratis lainnya, partai politik mendapatkan pendanaan yang cukup dari negara. Ini merupakan langkah untuk menghindari korupsi yang dilakukan oleh partai politik. Hampir 400 juta dollar US digelontorkan untuk membiayai pendanaan 30 partai politik di Brazil. Pembagian dilakukan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi di legislatif," jelas Fadli Zon.

Adanya anggaran negara terhadap partai politik saat ini juga sedang menjadi pembahasan hangat di Indonesia dalam paket UU Penyelenggaraan Pemilu yang

saat ini sedang di bahas di DPR RI.

"Melihat pengalaman berbagai negara lain, seperti Brazil, Meksiko dan juga beberapa negara demokratis lainnya, perlu adanya biaya yang cukup dari negara untuk partai politik. Hal ini juga untuk mencegah korupsi yang dilakukan oleh anggota partai politik. Saat ini, di Indonesia, anggaran negara untuk partai politik dihargai Rp108 per suara. Ini terlalu kecil, sehingga mengakibatkan banyak penyimpangan anggaran yang dilakukan kader partai politik karena dana kegiatan partai yang kurang," ujar Fadli Zon.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menjelaskan kondisi terkini pendanaan partai politik di Indonesia yang



Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Fadli Zon didampingi Ketua Baleg DPR RI, bersama Wakil Ketua DPR Brazil

sedang tahap pengkajian untuk dinaikan menjadi Rp5.000 per suara. "Kami sedang kaji agar anggaran dinaikan menjadi Rp5.000 per suara. Kenaikan anggaran juga akan disertai transparansi yang jelas

serta sistem pelaporan yang akuntabel, sehingga ke depan partai politik punya cukup pemasukan untuk membiaya berbagai kegiatan. Ini juga bisa mengurangi potensi korupsi," jelas Fadli Zon.

Fadli Zon juga menyampaikan harapannya agar politik dan ekonomi Brazil bisa segera pulih dan membaik. Usai pertemuan, delegasi diperkenalkan dalam rapat

pleno paripurna parlemen yang sedang membuat keputusan tentang *budget*. Sementara di luar Gedung Parlemen ribuan demonstran menyampaikan aspirasi tentang politik nasional Brazil. ■

(b.m.p.) foto: Dokbr.

Taufik Kurniawan Sampaikan Bela Sungkawa atas Wafatnya Mar'ie Muhammad

Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan mengucapkan duka cita dan bela sungkawa atas wafatnya Mar'ie Muhammad, mantan Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan di era Orde Baru. Menurut Taufik, Mar'ie Muhammad adalah salah satu putera terbaik bangsa. Sosoknya yang tegas, berani dan penuh tanggung jawab dalam membersihkan Ditjen Pajak kala itu.

“ Saya menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam atas kepergian salah satu putra terbaik bangsa, salah satu ekonomi Indonesia yang terkenal sangat sangat bersih dan jujur, yaitu Bapak Mar'ie Muhammad, Dirjen Pajak dan Menteri Keuangan di era Orde Baru,” ujar Taufik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlemen pada Minggu, (11/12).

Politikus PAN itu mengenal Mar'ie sebagai sosok yang tegas, berani dan penuh tanggung jawab. Terutama saat membersihkan Ditjen Pajak yang terkenal sebagai 'lahan basah' bagi oknum PNS petugas pajak yang kongkalikong dengan wajib pajak dan merugikan negara hingga triliunan rupiah.

"Jangankan pengusaha, Presiden Soeharto yang saat itu sangat ditakuti, juga ditertibkan oleh beliau," ulas Taufik.

Dia teringat ketika 1989, Direktorat Pajak yang dipimpin Mar'ie sedang gencar-gencarnya mengumpulkan data untuk pajak bumi dan bangunan (PBB). Bahkan Mar'ie sendiri yang datang dan memimpin tim ke kediaman Presiden Soeharto, lalu mengukur sendiri luas rumah dengan pita ukur yang

dibawanya.

"Saya ingat betul ucapannya di koran maupun televisi, Tak peduli presiden atau pengusaha atau siapa saja, soal kewajiban membayar pajak, tidak ada pengecualian. Paling tidak selama saya jadi Dirjennya," ujar Taufik menirukan perkataan Mar'ie yang diberitakan media.

Karena kegigihan dan keberanian Mar'ie bersih-bersih kantor pajak, lanjut dia, target penerimaan pajak saat itu yang semula hanya Rp9 triliun, melampaui target hingga menyentuh angka Rp19 triliun.

Ketika menjabat sebagai menteri pun, Mar'ie menjadi satu-satunya orang yang berani menolak dana taktis dan anggaran perjalanan dinas pejabat negara, yang dinilai terlalu besar.

Taufik menuturkan, yang paling heboh saat itu, beliau berani menolak perintah Presiden Soeharto agar negara membiayai program pemerintah untuk membeli 39



Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan

kapal perang dari Jerman Timur tahun 1993 yang dinilai terlalu mahal. Karena kerasnya argumen Mar'ie saat itu, dari total USD 1,1 miliar, hanya USD 319 juta yang disetujuinya untuk membiayai proyek pemerintah tersebut.

"Sangat wajar jika Pak Mar'ie M u h a m m a d

mendapatkan julukan *Mr. Clean*, karena beliau memang bersih, jujur dan hidup sangat sederhana namun bersahaja, meski beliau adalah pejabat tinggi negara, seorang menteri keuangan saat itu," sebut dia.

"Begitu banyak jasa yang beliau tinggalkan. Sebagai anak bangsa sekaligus generasi penerus, sosok almarhum adalah teladan yang sangat baik. Semoga cita-cita dan harapan beliau yang baik akan mampu terwujud dan dilanjutkan oleh kita," pungkas Taufik. ■

(b.m.p.) Foto: Kresnaabr

DPR RI Berbagi Pengalaman Kelola Konflik kepada Ulama Afghanistan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah memastikan, DPR RI akan memberikan perhatian khusus pada pengelolaan konflik di Afghanistan. Mengingat, konflik di Afghanistan yang tak kunjung usai, dan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Afghanistan yang telah terjalin dari tahun 1954.

Demikian dikatakannya usai menerima 18 ulama senior Afghanistan di ruang tamu Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12). Kunjungan ulama Afghanistan ini dalam rangka serial *Workshop Islam, Leadership, and Peace Building, Study and Dialogue Visit to Jakarta*.

"Saya kira, kita perlu memberikan perhatian khusus kepada Afghanistan. Afghanistan memperoleh kemerdekaannya dengan perang, hampir sama dengan kita. Sampai-sampai mereka untuk membangun negara itu sulit, karena masih ada konflik antar suku dan agama yang masih sangat luas," jelas Fahri.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu menambahkan, sejumlah ulama Afghanistan itu ingin mengetahui kiat Indonesia dalam mengelola dan menyelesaikan konflik. "Indonesia lebih beragam. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 1000 bahasa, dan lebih dari 700 suku, kita bisa bertahan. Karena kita memiliki pondasi dan sistem

perdamaian yang kuat, yakni Pancasila," imbuh Fahri.

Fahri melihat ketertarikan ulama Afghanistan pada Pancasila. Ia menjelaskan, bahwa Pancasila merupakan gabungan antara ide keagamaan dengan ide kebangsaan. Pendiri Indonesia yang berjiwa agamawan, ilmuwan, negarawan, dan politisi, tidak mengkotak-kotakkan antara ulama dan pemimpin negara.

"Ini semua bergabung, itu yang melahirkan Pancasila. Di atas Pancasila, kita membuat konstitusi, di atasnya kita membangun negara yang kuat. Ini yang rupanya yang perlu mereka dalam dan pelajari, sehingga ada komitmen untuk berpegang pada sesuatu yang kuat sifatnya, karena mereka juga relatif beragam," jelas Fahri.

Politisi asal dapil Nusa Tenggara Barat itu mengatakan, Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, dimana lembaga negara ini salah satu tugasnya adalah untuk menyelesaikan sengketa di antara lembaga



Suasana pertemuan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah dengan 18 ulama senior Afghanistan

negara. Konsep ini menurutnya dapat dicontoh oleh Afghanistan.

"Karena mereka juga ada sengketa antara parlemen dengan presidennya itu yang tak kunjung selesai. Mereka tidak seberagam kita, tetapi konflik juga tidak selesai-selesai. Itu yang mereka ingin tahu, dan akan kita bantu perdalam," tutup Fahri, sembari mengatakan dirinya juga sudah berkomunikasi dengan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia, agar lebih konsultatif terkait agenda para ulama itu di Indonesia. ■

(9). Foto: Naqijah/br

Fahri Hamzah Sumbangkan Dana Pribadi Untuk Bencana Pidie Jaya

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah mengunjungi para korban gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Rumah Sakit Umum Daerah Chik Ditiro, Sigli menjadi lokasi pertama yang disinggahinya dimana sejumlah pasien gempa di Pidie Jaya Aceh dirawat di lorong-lorong rumah sakit itu, Minggu (11/12).

“ Saya sendiri sebagai pembuka sedikit membawa dana pribadi yang bisa langsung disumbangkan untuk keperluan korban gempa yang diperlukan segera,” ujar Fahri.

Pimpinan DPR RI Korkesra ini menambahkan, setiap ada bencana, kita sebar rekening khusus melalui *broadcast* kepada anggota dan diumumkan di Rapat Paripurna, lalu anggota menyumbang dan nanti diantarkan kepada pemerintah daerah dan pihak-

pihak lokal yang memang terbukti bisa menyalurkan.

Dalam Kunjungan Spesifik ini, Fahri menjelaskan bahwa sebagai Koordinator bidang Kesra, urusan bencana juga menjadi koordinasi dibawahnya. "Kementerian Sosial, BNPB, dan lembaga-lembaga terkait dengan bencana itu semua merupakan kemitraan dibawah koordinasinya yaitu Komisi VIII, Komisi IX dan Komisi X," tekan dia.

Sekaligus lanjut Fahri, dirinya ingin

memastikan bahwa dalam hal ini Pemerintah telah terlibat cukup jauh dalam menangani secara cepat persoalan yang ada di lapangan, dan juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi karena sudah melakukan kunjungan langsung ke Pidie Jaya, sehingga instruksinya bisa langsung cepat dilaksanakan.

"Kita sebagai anggota legislatif datang untuk memastikan semua mobilisasi itu terjadi dengan cepat sehingga potensi bahaya lanjutan bisa

dihindari, korban lanjutan mungkin bisa dihindari, apalagi sampai pagi ini kita mendengar masih ada gempa susulan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Fahri mengatakan akan berkoordinasi dengan kemitraan lokal, apa kritik dan persoalan yang dihadapi oleh para korban bencana, sehingga bisa dijadikan sebagai komunikasi DPR RI dengan Pemerintah Pusat di Jakarta.

"Dewan secara pribadi juga sudah

rutin sejak awal periode ini, kalau ada bencana selalu melakukan himbauan kepada anggota untuk menyumbangkan gajinya, sebab pos belanja bencana itu kan adanya di eksekutif. Tetapi kalau Anggota Dewan mau membantu itu akan ditampung melalui rekening khusus dan kita sudah mulai sosialisasikan," pungkas Fahri. ■



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah meninjau reruntuhan bangunan akibat gempa di Aceh

RUU Jasa Konstruksi Resmi Disahkan Menjadi UU

Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi secara resmi disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (15/12).

“ Saya akan menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi dapat disetujui menjadi UU,” tanya Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah selaku pimpinan Rapat Paripurna. “Setuju...” jawab anggota dewan, dan palu pun diketuk tanda pengesahan.

“Ini adalah salah satu Undang-Undang penting, karena kita sedang membangun,” lanjut Fahri usai mengetuk palu.

Sebelumnya dalam laporannya, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Prancis menyampaikan semakin tingginya tingkat persaingan sektor Jasa Konstruksi, baik ditingkat nasional maupun internasional membutuhkan payung hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha dibidang Jasa Konstruksi terutama perlindungan bagi Pengguna Jasa, Penyedia Jasa, tenaga kerja Konstruksi, dan masyarakat Jasa Konstruksi.

Dalam pengaturan usaha Jasa Konstruksi, ujar Fary, yang meliputi struktur usaha, segmentasi pasar, persyaratan usaha diatur pula pengembangan jenis usaha Jasa Konstruksi yakni Usaha Penyediaan Bangunan serta pengembangan usaha berkelanjutan. “Badan usaha dan usaha perorangan asing serta tenaga kerja konstruksi asing, diatur dengan persyaratan yang ketat,” tegas Fary.

Lalu, lanjutnya, pentingnya pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi oleh pengguna jasa dan atau penyedia jasa mendapat prioritas guna mencegah terjadinya kegagalan bangunan. “Penentuan mengenai kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli,” jelas Fary.

Pada sisi penguatan sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam menghadapi persaingan global, terang politisi Gerindra ini, dibutuhkan payung hukum yang kuat guna meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam negeri melalui Sertifikasi Kompetensi Kerja, pemenuhan upah, dan remunerasi minimal bagi tenaga kerja konstruksi ditingkat jabatan ahli telah diatur dalam UU ini. “Diharapkan pelaku Jasa Konstruksi menjadi tuan rumah dinegaranya sendiri,” harap Fary.

Selain itu, tambahnya, UU ini memberi penguatan terhadap asosiasi dibidang Jasa Konstruksi baik asosiasi tenaga kerja maupun asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi.

“Tim Panja Komisi V DPR RI dan pemerintah juga bersepakat menghapus ketentuan pidana dan menekankan penegakan hukum pada aspek administratif dan keperdataan. Dalam hal terjadi sengketa antar pihak, diterapkan prinsip dasar musyawarah untuk mufakat,” terang Fary.

Untuk menjamin keberlangsungan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi, RUU ini juga mengatur apabila ada dugaan kejahatan atau pelanggaran oleh pengguna dan penyedia jasa, maka proses hukum dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

“Dalam hal adanya dugaan kejahatan atau pelanggaran terkait kerugian negara, pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang,” papar Fary.

Sekedar informasi, RUU Jasa Konstruksi merupakan usul inisiatif DPR RI awalnya terdiri atas 15 Bab dan 113 pasal, setelah melalui sejumlah pembahasan dan perumusan intensif, akhirnya berhasil diselesaikan menjadi 14 Bab dan 106 pasal, sedangkan UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebelumnya terdiri dari 12 Bab dan 46 Pasal.

Dengan perubahan sistematika dan materi muatan lebih 50 persen dari UU No.18 Tahun 1999, maka RUU ini merupakan pengganti UU No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. ■



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Prancis menyerahkan RUU Jasa Konstruksi kepada Pimpinan DPR RI

Indikator Pembangunan Masyarakat Versi Pemerintah Tidak Sesuai Kenyataan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah mengatakan indikator pembangunan masyarakat yang sering diungkapkan pemerintah tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat menjadi *keynote speaker* di seminar nasional "Indikator Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Parlemen" yang digelar oleh Badan Keahlian DPR.

“ Diskusi dengan para peneliti di sektor kesejahteraan sosial ini ingin memetakan indikator kesejahteraan sosial secara mendalam. Karena selama ini saya melihat indikator pembangunan masyarakat yang sering diungkapkan pemerintah tidak sesuai dengan riil di masyarakat,” ungkapnya di ruang rapat Pansus C, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Lebih lanjut, Politisi F-PKS itu berharap agar indikator pembangunan kesejahteraan sosial yang dibuat oleh peneliti-peneliti DPR RI dari BKD, nantinya bisa menjadi bahan yang menjadi pegangan anggota di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

"Ini yang menurut saya perlu kita bangun. cara kerja DPR RI harus semakin fokus dalam rapat-rapat yang dilakukan sehari-hari dengan pihak pemerintah dalam fungsi pengawasan. Agar *brand* DPR RI semakin tajam, karena pelaksanaannya juga ditagih oleh rakyat yang semakin kritis," katanya.

"Apalagi pertanyaan rakyat kita itu sangat kritis oleh karena itu, kita harus membangun dapur supaya DPR RI kalau nanya ke pemerintah tajam dan fokus, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh konstituennya. Jangan sampai percakapan di ruang rapat seperti tidak relevan, karena tidak adanya indikator yang tajam yang kita bekalkan kepada Anggota Dewan untuk bertanya," tambahnya.

Saat ini BKD, lanjut Fahri sudah sangat masif sebagai badan pendukung kinerja dewan. Dirinya berharap, kedepannya BKD bisa seperti LIPI karena kita butuh pusat kajian diberbagai bidang untuk membangun *brand* DPR RI semakin baik.

"DPR RI sedang giat sekali memodernisasi alat pendukungnya, salah satunya Badan Keahlian DPR RI. Karena DPR RI tidak hanya terdiri dari politisi tetapi harus disertai oleh pusat ilmu pengetahuan," harapnya.

Sebelumnya, dalam, *workshop* Kepala BKD Johnson Rajagukguk menyampaikan,

bahwa dengan adanya indikator, DPR RI akan dapat memastikan sejauh mana masalah kesejahteraan sosial dapat diatasi.

"Diskusi yang kali ini digelar menjadi penting untuk menjadi instrumen di dalam menyusun kesejahteraan sosial di masyarakat. Sehingga DPR RI bisa memastikan sejauh mana masalah sosial dapat diatasi, sejauh mana kebutuhan rakyat terpenuhi serta sejauh mana akses pelayanan sosial tersedia bagi masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Johnson mengatakan hal tersebut juga akan mempermudah kinerja dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah serta mencari solusi dari permasalahan kesejahteraan sosial yang ada.

"Tindakan selanjutnya pun akan lebih mudah ditentukan misalnya dengan menyusun serta memperbaiki UU atau dengan perbaikan dari sisi anggarannya, kalau masalah sosial itu betul-betul sudah ditentukan indikatornya," terang Johnson.

Oleh karena itu, lanjut Johnson dalam perspektif DPR RI indikator kesejahteraan sosial yang disusun tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. "Indikator tersebut seharusnya tidak hanya sekedar indikator kuantitatif melainkan dapat menunjukkan kesejahteraan yang sebenarnya," katanya.

Untuk mengetahui indikator masalah kesejahteraan sosial, pihaknya melakukan berbagai kegiatan penelitian dan seminar nasional untuk mendapat masukan. "Kita tidak mungkin menentukan indikator itu hanya semata-mata, harus ada dasar yang dijadikan sebagai landasan untuk menjadikan indikator itu, salah satu kegiatan yang kita lakukan selain penelitian yaitu seminar dengan mengundang pembicara yang akan menyumbangkan pemikirannya," ungkapnya.



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah bersama Kepala BKD

Dalam seminar yang digelar Bidang Kesejahteraan Sosial Pusat Penelitian dari Badan Keahlian DPR hadir pula K.H Jalaludin Rakhmat (Komisi VIII), Dr. Ir. Subandi, M.Sc. (Bappenas), Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono (UI) dan Bhima Yudhistira Adhinegara, M.A (INDEF) sebagai pembicara dalam seminar. ■

(rmm), Foto: Kani/br

UNEP Apresiasi Keberhasilan Indonesia Kelola Lingkungan

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan *United Nations Environment Programm* (UNEP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (13/12) guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah mengucapkan terima kasih kepada UNEP karena telah banyak membantu Indonesia dalam program pengelolaan lingkungan.

DPR RI Upayakan Kepastian Hukum Kedaulatan NKRI di Selat Singapura

Rapat Paripurna DPR RI secara aklamasi mengesahkan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura menjadi Undang-Undang, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, (15/12).

Pengesahan tersebut bertujuan agar menciptakan kejelasan kepastian dan kelengkapan batas wilayah Republik Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung saat menyampaikan laporan Komisi I dalam Rapat Paripurna.

"Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura bertujuan menetapkan garis batas laut wilayah antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura," ujar Asril.

Politisi Gerindra ini menuturkan, pengesahan RUU ini juga sebagai wujud nyata dalam memperkuat kedaulatan, pertahanan dan keutuhan wilayah NKRI serta mampu memberikan

landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan dalam memberantas lintas batas nasional.

"Apakah laporan Komisi I mengenai RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut

Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura dapat disetujui menjadi UU?" tanya Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memimpin rapat. "Setuju." jawab seluruh anggota yang hadir dalam Rapat Paripurna tersebut.

Melalui pengesahan RUU ini, selain mampu memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, diharapkan juga mampu mendorong kerja sama Indonesia dengan Singapura dalam berbagai bidang seperti pengelolaan perbatasan.

Asril juga mengucapkan terima kasih kepada Tim *Interdept* Pemerintah yang telah berkooperatif dalam pembahasan RUU ini. "Kami ucapkan terima kasih kepada Tim *Interdept* Pemerintah yang telah secara kooperatif, sungguh-sungguh dan bekerja keras dalam pembahasan RUU ini," tutup Asril. ■



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung menyerahkan laporan Komisi I kepada Pimpinan DPR RI

“ Kami menerima tamu istimewa dari UNEP. Indonesia pun berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu kita dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga yang ada di Indonesia,” ujar Fahri.

Politisi PKS ini menegaskan, ke depannya akan lebih lokal dalam mengelola lingkungan agar bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia ikut serta dalam meratifikasi konvensi

Internasional tentang perubahan iklim "Kita berharap semuanya akan seperti *key issue* untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam



Suasana pertemuan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah dengan United Nations Environment Programm (UNEP)

meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim," terang Fahri.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif UNEP Erik Solheim mengatakan apresiasinya terhadap keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan

mengunjungi beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

"Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia," ujar Eric juga Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)

Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR RI Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Christy Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. ■

Semangat Gotong Royong Tangani Gempa Aceh Luar Biasa

Terkait gempa bumi yang terjadi di Pidie Jaya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menghimbau negara untuk hadir memfasilitasi para korban yang berjatuh. "Jangan sampai kekurangan obat-obatan dan peralatan, sebab semangat kegotong royongan yang datang dari masyarakatnya sudah luar biasa, tinggal tugas pemerintah menyiapkan biaya dan peralatan, serta obat-obatan yang diperlukan dalam penanganan korban gempa" ujar Fahri di Pidie Jaya Aceh, Minggu (11/12).

Pimpinan DPR RI ini menilai sikap gotong royong di antara masyarakat dan juga para tenaga medis khususnya dokter bedah patut di apresiasi. "Dokter bedah ini terbang dari seluruh Indonesia, terutama dari kota-kota besar datang kesini, membawa alat sendiri, membawa obat sendiri, hanya perlu tempat seperti di RS Chik Ditiro ini sehingga kasus sekitar 60-an pasien di sini dapat ditangani cepat," ujar Fahri.

Fahri menambahkan, kasus di RS Chik Ditiro itu bukan hal yang mudah. Ada yang patah selangkangannya, patah kaki, patah tulang belikat dan seterusnya itu ditangani dalam tempo 3 hari sebanyak 60 lebih pasien selesai. "Itu luar biasa semangat kegotong royongan yang ditunjukkan para medis," tandas Wakil Ketua DPR RI dari Dapil NTB ini.

Menjelaskan hasil temuannya di Pidie Jaya, Fahri mengungkapkan bahwa di sana diperlukan air bersih, tenda-tenda pengungsi dan dapur umum untuk relokasi

sementara. "Kita pantau, jangan sampai ada obat, peralatan medis dan tenda yang kurang. Harus segera kita supply," kata Fahri Hamzah.

Masalah dana keperluan bencana seluruh Indonesia, Fahri menjelaskan bahwa semua itu sudah dialokasikan secara nasional. Kalau ada satu titik seperti di Pidie Jaya itu dananya sudah ada, jadi penyediaannya bisa berjalan dengan lancar.

Keluhan yang ditemukan, lanjut dia, sejauh ini nampak sekali kalau pasien itu trauma, mereka takut dan tidak mau ditempatkan di dalam (kamar inap RS). "



Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah mengunjungi korban gempa di Pidie Jaya, Aceh

Tadi kelihatan numpuk bukan karena tidak ada tempat, tapi lebih karena mereka nggak berani masuk ke dalam, khawatir akan terjadi guncangan susulan, mereka ingin cepat-cepat segera keluar," kata Fahri menambahkan. ■

(ano.mp), Foto: Kresno/hr

RUU Pertembakauan Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR RI

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan menjadi RUU inisiatif DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

“Apakah RUU usul anggota DPR RI tentang Pertembakauan dapat disetujui menjadi RUU inisiatif DPR RI,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memimpin sidang Paripurna penutupan Masa Sidang II TS 2016 - 2019.

Dalam rapat tersebut, sembilan Fraksi DPR RI menyetujui RUU Pertembakauan disahkan menjadi inisiatif DPR RI. Sementara, Fraksi PAN memandang RUU Pertembakauan belum dapat disahkan dalam rapat paripurna kali ini.

Dalam interupsinya, anggota Baleg Haerudin menyampaikan pandangan Fraksi PAN menolak RUU Pertembakauan dengan beberapa alasan. "Dampak dari tembakau sampai hari ini jutaan jiwa butuh perlindungan dan kajian mendalam. Untuk hal itulah Fraksi PAN memandang belum bisa

menerima menjadi RUU," ungkapnya.

Menanggapi interupsi tersebut, Fahri Hamzah mengatakan pembahasan RUU Pertembakauan akan dibahas melalui mekanisme seperti biasanya sehingga



Pimpinan DPR RI

aspirasi atau masukan dari masyarakat bisa terserap.

Sementara itu, anggota Baleg lainnya Aria Bima (F-PDIP) mengusulkan agar pembahasan RUU Pertembakauan tidak hanya dibahas oleh satu Komisi, melainkan lintas Komisi atau Panitia Khusus.

Mengingat, banyak pihak yang memandang RUU Pertembakauan dari berbagai perspektif.

"Ada yang melihat dari dimensi kesehatan, ada yang melihat dari aspek ketenagakerjaan, ada juga yang melihat penerimaan negara dan hal yang terkait

dengan *heritage* dari para leluhur kita dalam berbudaya tembakau. Untuk itu, kami meminta RUU Pertembakauan dibahas di Pansus karena persoalannya yang cukup kompleks terlihat dari banyaknya perbedaan sudut pandang," tandas politisi dari F-PDIP itu. ■

(amr, mp), Foto: Jakarta/br

Timwas TKI DPR RI Himpun Masukan di Kepri

Secara yuridis formal kebijakan tentang tenaga kerja yang bekerja di luar negeri diatur dalam undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) beserta aturan pelaksanaannya.

Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terhadap penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang hingga saat ini masih banyak ditemukan berbagai permasalahan. Hal tersebut disampaikan Ketua Timwas TKI dan juga anggota Komisi III Masinton Pasaribu saat melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, (9/12).

Kunjungan kerja ke Kepulauan Riau ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran permasalahan dalam penempatan dan perlindungan TKI di provinsi ini dan upaya yang telah dilakukan seluruh pihak terkait untuk penyelesaian masalah tersebut.

"Mengingat permasalahan TKI bersifat kompleks dan mencakup berbagai pihak maka penanganannya harus diselesaikan secara tuntas melibatkan seluruh *stakeholder*," tegas anggota dppil Jakarta II.

Timwas TKI berharap dalam penyelesaian TKI bermasalah yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, perlu ada langkah nyata dari pemerintah agar tidak terjadi kasus yang serupa kembali, Pertama dari segi penempatan, dan bagaimana pemerintah dalam memberikan pembekalan keahlian dan pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia sesuai

dengan profesinya," lanjutnya.

Usai rapat kordinasi dengan sejumlah pihak, tambah Masinton, Timwas TKI akan membawa hasilnya menjadi bahan

tidak usah kembali dan bekerja di dalam negeri saja.

Sebanyak 69 orang laki-laki dan 22 wanita 2 anak 3 dan satu bayi yang berada di rumah RPTC.



Timwas TKI DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemprov Kepulauan Riau

masukan dalam rapat-rapat di DPR RI, serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar lebih mengintensifkan dan memperbaiki sistem dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama Timwas TKI mengunjungi Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) dan berinteraksi langsung dengan sejumlah TKI dan TKW yang dideportasi atau dipulangkan karena bermasalah dengan kelengkapan dokumen.

Saat ditanya perwakilan anggota Apakah masih mau kembali, jawabnya ada yang mau kembali dan ada yang akan usaha di kampung halamannya, lalu anggota Timwas TKI menghimbau agar

Asisten 2 provinsi kepulauan Riau Syamsul Bahrum menjelaskan permasalahan pokok TKI di antaranya: adanya dokumen jati diri asli tapi palsu, pungutan liar, sertifikat pelatihan, uji kesehatan dan uji kompetensi dipalsukan. Selain itu asuransi tidak dibayarkan tidak langsung kepada TKI tetapi melalui PPTKIS, sarana dan prasarana

penampungannya kurang memadai, dan penempatan yang tidak terkoordinasi. Juga, majikan tidak memenuhi perjanjian kerja/gaji tidak di bayar, penganiayaan pelecehan seksual, banyaknya dideportasi karena bekerja secara ilegal, selain itu proses pemulangan menjadi objek pemerasan, pemerkosaan, pembunuhan, dan manajemen pelayanan pemberangkatan dan pemulangan kurang optimal.

Tim kunjungan kerja Timwas TKI ini diikuti oleh beberapa Anggota DPR RI yakni, Ketua Tim/F-PDIP Masinton Pasaribu, Anggota F-Gerindra H.Suir Syam M, Anggota dari F-PKB Nihayatul Wafiroh. ■

(rny), Foto: Ruzi/br

BURT DPR RI Sosialisasi Renstra 2015-2019 ke Sulsel

Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketuaanya Agung Budi Santoso melaksanakan Sosialisasi Rencana Strategis DPR RI 2015-2019 di Makassar, Sulsel, Jumat (9/12). Bertempat di Ruang Data Lantai 2 Kantor Gubernur Provinsi Sulsel Tim Kunker diterima oleh Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo.

Hadir pula dalam acara ini Bappeda Provinsi Sulsel, sejumlah Pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulsel dan kalangan akademisi dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Muhamadiyah Makassar.

"Tujuan kami mendapatkan masukan langsung pemangku kepentingan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan para akademisi untuk bagaimana renstra itu nanti bisa menjadi hal yang menjadikan DPR RI yang kuat, modern, berwibawa dan kredibel serta dipercaya masyarakat," ujar Agung, politisi Partai Demokrat Dapil Jawa Barat I.

Menurut Agung, penyusunan Renstra DPR RI bukan perkara yang mudah karena Dewan terdiri dari 560 anggota dengan berbagai latar belakang berbeda dengan wilayah keterwakilan di seluruh Indonesia.

Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) DR Agus Salim menyoroti



Wakil Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso

mengenai belum adanya pengukuran kinerja sebagai bagian yang menyertai sasaran strategis yang akan dicapai DPR RI.

"Renstra yang ingin dicapai DPR RI tidak ada indikatornya, seharusnya ada target yang dinyatakan dengan angka-angka kuantitatif supaya kemudian bisa diukur *output* kinerjanya dan bisa dievaluasi," ujar Agus yang merupakan doktor ahli perencanaan pembangunan Unhas. Dengan adanya ukuran yang jelas, maka perencanaan termasuk kerangka pendanaan dalam pencapaian visi target DPR RI selama lima

tahun akan terukur pula.

Menanggapi hal ini, anggota BURT Syaiful Bahri Anshori (FPKB) sepakat bahwa usulan tersebut sangat sesuai dengan visi membangun DPR RI modern transparan dan punya integritas.

"Kekurangan kita memang belum adanya *output* kinerja, kita belum pernah mengukur secara

kuantitatif maupun kualitatif hasil kerja misalnya soal prolegnas, prosentase transparansi, kinerja anggota dewan dan sebagainya walaupun sebenarnya sulit diukur karena kita lembaga politik," jelas Syaiful yang merupakan anggota dewan dari Dapil Jawa Timur IV.

Walaupun sulit, dia berharap upaya pendataan *output* kinerja ini perlu ditingkatkan, sehingga betul-betul mewujudkan DPR RI yang kuat, modern secara sistem. ■

(Ran), Foto: Rizka/br

Komisi V DPR RI Apresiasi Kesiapan Sumut Jelang Natal Dan Tahun Baru

Komisi V DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dalam mempersiapkan transportasi menjelang libur Natal 2016 dan Tahun Baru 2017. Berdasarkan pantauan Komisi V, Pelabuhan Belawan, Stasiun Kereta Api Bandara Medan, dan Bandara Internasional Kuala Namu persiapannya cukup bagus.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said (FPG) saat melakukan kunjungan spesifik ke Sumut diikuti sejumlah anggota Komisi V DPR RI, Rabu (14/12).

Menurut Muhidin, Pelabuhan Belawan sudah cukup bagus bahkan sudah sangat meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Tadi kita sudah cek langsung Kapal Kelud dan sempat berdialog dengan

penumpang. Baik mereka yang datang maupun yang pergi, ternyata semua penumpang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan otoritas pelabuhan, Pelni maupun Penanggungjawab Pengelolaan dari Pelindo I," jelas Muhidin.

Pelabuhan Belawan terletak di bagian utara kota dan pelabuhan ini merupakan pelabuhan Indonesia tersibuk di luar Pulau Jawa. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pelayanan di hari libur nanti.

Karena otoritas pelabuhan, Pelni maupun Penanggungjawab Pengelolaan dari Pelindo I akan memberikan pelayanan maksimal. "Memang itulah kewajiban pemerintah harus hadir di situ dan melihat langsung bagaimana kesiapan-kesiapan yang dilakukan baik dari Pelni maupun dari Pelindo I," tambah Muhidin.

Begitu juga dengan Bandara Internasional Kuala Namu, apakah Angkasa Pura I dan otoritas bandara juga

akan melakukan hal yang sama dalam menyambut dan mempersiapkan libur panjang serta memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh masyarakat yang ingin memanfaatkan transportasi pesawat udara.



Wakil Ketua Komisi V Muhidin M Said

Terkait dengan transportasi Kereta Api dalam kota, Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, pengguna transportasi kereta api naik 20%. Petugas-petugas itu sudah mempersiapkan dan mengantisipasi dari segi penambahan frekuensi kedatangan dan keberangkatan kereta api. "Jadi transportasi kereta api dalam kota, kesiapan dan pelayanannya sudah ok, tidak ada masalah," ujarnya.

Terkait dengan jalan Tol Belmera (Belawan-Medan-Tanjung Morawa) Muhidin mengatakan, memang ada titik-titik yang sangat rawan terutama menyangkut masalah pembebasan lahan. Apalagi masuk dalam kota yang kadangkala harga tidak sesuai dengan NJOP, sehingga memerlukan konsolidasi ke dalam. Jalan tol ini panjangnya kurang lebih

20 Km, tapi masih ada lahan 1-2 Km bermasalah. Ini yang masih menjadi kendala dan harus dilakukan konsolidasi baik dengan Pemda, Pemkot maupun Pemerintah Pusat, sehingga semua hambatan bisa teratasi.

Muhidin berharap tahun 2018-2019 semua konektivitas seluruh Sumatera ini bisa tercapai. Dia melihat Pemerintah, para investor, dan BUMN yang diberi penugasan di sektor itu sudah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

"Dari sisi anggaran atau sisi pembiayaan tidak ada masalah, karena sejalan dengan target-target pemerintah dan target-target dalam rangka meningkatkan pelayanan, konektivitas wilayah di antara satu dengan yang lain," tambah Muhidin. ■

(ew), Foto: Akshabr

Lindungi TKI dengan Perkuat Diplomasi

Anggota Komisi I DPR RI sekaligus Tim Pengawas terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ahmad Zaenudin, meminta pemerintah memperkuat posisi Indonesia dalam memberikan perlindungan kepada TKI. Dia juga berharap kepada pemerintah agar melakukan diplomasi dengan negara-negara tujuan utama para tenaga kerja asal Indonesia.

Menurutnya, permasalahan terkait perlindungan TKI cukup kompleks, tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Dalam hal ini, pemerintah daerah bersama kementerian terkait hingga pemerintah pusat harus membangun komunikasi yang kuat.

"Antar kementerian harus berkoordinasi, termasuk bagaimana Kementerian Luar Negeri harus membangun diplomasi yang kuat untuk memberikan *positioning* yang jelas," tegas politisi F-PKS di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (09/12).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa langkah-langkah penguatan diplomasi bisa dicapai dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja ke negara-negara yang belum memiliki aturan perundang-undangan yang jelas terhadap TKI.

"Negara yang tidak mempunyai aturan layak, *stop* kita kirim. Sekarang pun, setelah



Anggota Timwas TKI DPR RI Ahmad Zaenudin

moratorium di Timur Tengah mereka menjerit. Nah, ketika mereka menjerit harusnya pemerintah membuat *statement* bahwa hanya akan mengirim tenaga kerja ke negara yang sudah punya aturan perlindungan TKI," ungkap Anggota Komisi I itu.

"Sehingga dengan adanya *statement* yang tegas dari pemerintah, tentu negara-negara tersebut akan menyesuaikan dengan sikap kita," tandasnya.

Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi, sebagai salah satu daerah pengirim TKI terbanyak, ia meminta diplomasi di KBRI dan KJRI diperkuat melalui *instrument* ketenagakerjaan untuk mengurangi berbagai kasus permasalahan TKI.

"Ada beberapa kasus, WNI asal NTB meninggal ditembak, meninggal begitu saja tanpa ketahuan apa sebabnya. Perlu ada verifikasi,

kalaupun seseorang meninggal tanpa alasan yang jelas kita bisa menuntut ganti rugi. Pemerintah harus tegas dalam hal seperti ini," ungkap Zainul Majdi.

Dari data yang terhimpun hingga September 2016, sebanyak 10 WNI asal NTB ditembak oleh polisi negeri sembilan diraja Malaysia. Terkait hal itu, Pemprov NTB telah bersurat ke Kemenlu, namun belum direspon oleh pihak Kementerian Luar Negeri. ■

(ans), Foto: Annabr

Komisi III DPR RI Wacanakan Pidana Kerja Sosial

Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia mengalami *over* kapasitas. Per April 2016, lapas mengalami *over* kapasitas mencapai 56 persen. Sebanyak 477 unit lapas dengan kapasitas 119.500 orang, namun harus menampung hingga 184.256 penghuni. Khusus untuk jumlah tahanan narkoba, mencapai lebih dari 67 ribu orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, harus ada kebijakan untuk mengatasi permasalahan *over* kapasitas ini. Ditemui saat memimpin kunjungan kerja spesifik ke Mapolda Jawa Tengah, di Semarang, Jateng, baru-baru ini, ia mengatakan lapas di Jateng pun mengalami *over* kapasitas, walaupun tidak sebesar di daerah lain. Lapas di Jateng hanya mengalami *over* kapasitas sebesar 13



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

dialihkan pada pidana kerja sosial.

"Pidana kerja sosial ini untuk tindak pidana yang ringan. Misalnya, orang yang menipu orang lain, kemudian uangnya sudah dikembalikan, itu bisa dipidanakan menjadi pekerja sosial, misalnya menyapu jalanan atau membersihkan fasilitas publik," kata Arsul.

Politisi asal dapil Jateng itu juga menyoroti, saat ini UU Narkotika memiliki kelemahan, karena belum ada pembaruan jenis narkotika baru, dan semua pelakunya harus dihukum penjara. Sehingga, jika pengedar dan penyalahguna tertangkap menggunakan narkotika jenis baru, maka tidak dapat dihukum.

"Itu kelemahannya. Maka UU Narkotika nanti akan direvisi. Penetapan jenis yang termasuk dalam jenis narkotika dan psikotropika tidak disebut dalam UU, tapi kita serahkan kewenangannya kepada Pemerintah. Pemerintah yang harus menerbitkan Peraturan Pemerintah, untuk

menggolongkan jenis narkotika dan psikotropika," jelas Arsul.

Kapolda Jateng Condro Kirono menjelaskan, pada tahun 2016, pihaknya telah mengungkap sebanyak 1.077 kasus. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun sebelumnya yang hanya 801 kasus.

"Polda Jateng berupaya menekan laju peningkatan penyalahgunaan narkoba, tidak hanya dilakukan melalui giat memutus, ungkap, dan memberantas rantai peredaran gelap narkoba, namun juga melakukan penanganan serius terhadap penyalahguna, maupun korban," jelas Kapolda Jateng.

Kunjungan kerja spesifik ini juga diikuti oleh Anggota Komisi III Risa Mariska (F-PDI Perjuangan), Wihadi Wiyanto (F-Gerindra), Erma Suryani Ranik (F-PD), Abdul Kadir Karding (F-PKB), Aboe Bakar Al Habsyi (F-PKS), dan Taufiqulhadi (F-Nasdem). Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Kajati Jawa Tengah, Kadispenda, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, hingga perwakilan DPRD Provinsi Jawa Tengah. ■

(67) Foto: Sofyan/Ar

persen.

"Ini tidak bisa diatasi hanya dengan menambah lapas. Harus ada strategi atau kebijakan penghukuman kepada penyalahguna atau pengedar narkoba. Artinya para terpidana narkoba yang pemakai murni, perlu dipertimbangkan apakah ke depannya dihukum di penjara, atau hukuman lain seperti pidana kerja sosial dengan ditambah rehabilitasi," kata Arsul.

Politisi F-PPP itu menambahkan, kebijakan hukuman pidana dalam UU KUHP perlu diubah, untuk mengurangi *over* kapasitas. Apalagi, anggaran untuk membangun lapas belum mampu. Menurut Arsul, pidana penjara bisa

DPR RI Setujui Dua Calon Deputi Gubernur BI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir melaporkan hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (15/12).

Dalam laporan tersebut Komisi XI DPR RI menyepakati dua Calon Gubernur Bank Indonesia untuk ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2016-2021. Yaitu Sugeng untuk menggantikan Ronald Waas dan Rosmaya Hadi menggantikan Hendar.

Kami mengharapkan agar Rapat Paripurna DPR RI dapat memberikan persetujuan atas hasil pembahasan terhadap dua Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dimaksud," papar Hafisz di hadapan Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Setelah Hafisz selesai melaporkan, Pimpinan Sidang menanyakan kepada para

Komisi III DPR RI Tak Setujui Dua Calon Hakim Ad Hoc di MA

Komisi III DPR RI tidak memberikan persetujuan kepada dua nama calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan dalam laporan yang dibacakannya di depan sidang Paripurna DPR RI, Kamis (15/12).

“ Pada hari Senin 05 Desember 2016 Komisi III DPR RI melaksanakan rapat pleno guna mendengarkan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi terhadap persetujuan calon hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA. Berdasarkan ketentuan pasal 279 Peraturan DPR RI tentang Tata tertib bahwa pengambilan keputusan dalam rapat DPR RI pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka Komisi III DPR RI memutuskan tidak memberikan persetujuan terhadap dua calon hakim Ad Hoc tersebut,” ujar Trimedya dalam laporannya.

Sebelum pengambilan keputusan tersebut, Komisi III DPR RI sebagaimana surat penugasan Badan Musyawarah DPR



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan

RI tanggal 18 November 2016 telah melakukan pembahasan dan uji kelayakan terhadap dua calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA. Dua calon Hakim Ad Hoc tersebut adalah Juanda Pangaribuan (Mantan Hakim Ad Hoc PHI di PN Jakarta Pusat), dan Sugeng Santoso PN (Mantan Hakim Ad Hoc PHI di PN

peserta sidang, tanpa penolakan dan catatan, para Anggota DPR RI menyepakati hasil laporan Komisi XI DPR RI untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dalam Rapat Paripurna ini juga dihadiri dua Calon Gubernur Bank Indonesia Sugeng dan Rosmaya Hadi.

Sebelumnya Hafisz melaporkan, bahwa Komisi XI telah melakukan Rapat Internal pada 1 November, untuk pengambilan keputusan dan disepakati mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Setelah dilakukan proses pemungutan dan penghitungan suara terhadap enam calon diperoleh hasil, Sugeng memperoleh 52 suara, dan Rosmaya Hadi

memperoleh 45 suara.

Komisi XI DPR RI melakukan proses seleksi berdasar surat Presiden RI No. R-64/Pres/10/2016, tanggal 11 Oktober 2016, perihal usul calon Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 25 Oktober 2016, Komisi XI DPR RI diberikan tugas untuk melakukan pembahasan calon Deputy Gubernur Bank Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2009, dinyatakan bahwa Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia diajukan dan diangkat oleh Presiden RI dengan persetujuan DPR RI.■



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tobir

Surabaya).

Tahapan uji kelayakan terhadap dua calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA tersebut adalah membahas rancangan mekanisme dan tata tertib, rancangan jadwal, rancangan pengumuman di Media Cetak nasional, rancangan judul makalah untuk mengetahui visi dan misi apabila calon terpilih, dan rancangan surat pernyataan yang akan ditandatangani calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA.

Dari berbagai tahapan yang telah dilakukan tersebut, rapat pleno Komisi III DPR RI tidak memberikan persetujuan kepada dua nama calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di MA tersebut.■

(Ayu) foto: Tim Parli/ur.

(obmp). Foto: Anah/br

Gemar Membaca Wujud Literasi Kebudayaan Bangsa

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan, gemar membaca merupakan bentuk literasi kebudayaan bangsa. Hal tersebut dapat terwujud melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi budaya baik dalam bentuk karya tulis maupun karya cetak.

“Gemar membaca ini harus menjadi budaya bangsa yang harus dikembangkan. Kalau kita ingin membuat bangsa kita memiliki ilmu pengetahuan yang lebih baik, gemar membaca harus menjadi budaya.” kata Sutan dalam rangkaian acara kunjungan spesifik Komisi X DPR RI dengan Kepala Bidang Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (9/12).

Di pertemuan tersebut, Politisi Fraksi-Gerindra itu menyayangkan terkait hasil laporan UNESCO tahun 2011 mengenai indeks membaca Indonesia yang berada pada posisi 0,001. Yang berarti dari 1.000 penduduk Indonesia hanya 1 orang yg mempunyai minat baca.

"Bagi saya tentunya ini menjadi hal yang mengejutkan dan memprihatinkan bagi dunia literasi bangsa kita. Budaya gemar membaca sebetulnya bisa tumbuh melalui kebiasaan membaca sejak kecil." ujarnya.

Untuk mewujudkan budaya gemar membaca menjadi suatu kebiasaan,



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

Sutan menjelaskan ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Tahapan pertama yaitu dengan cara mengajarkan anak-anak membaca sejak kecil. Ke dua dengan cara membiasakan anak-anak membaca sampai terbentuk karakter.

Di kesempatan yang sama Sutan juga menyinggung mengenai Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 yang implementasinya belum maksimal.

"Sejak disahkan sembilan tahun yang lalu, implementasi mengenai UU Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ini belum seperti yang diharapkan. Padahal seharusnya dengan

adanya perpustakaan dapat meningkatkan pengembangan literasi di Indonesia," kritiknya. asal dipil Jambi itu menilai dengan keberadaan perpustakaan seharusnya bisa menjadi motivasi dan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat literasi gemar membaca di Indonesia. Bukan hanya faktor dana dan tenaga kerja yang berkualitas, pemahaman

yang benar akan pentingnya lembaga perpustakaan bagi masyarakat, menjadi suatu langkah yang belum berhasil dilakukan Pemerintah Daerah dalam membangun perpustakaan yang lebih baik.

"Komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat belum menjadi skala prioritas bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara ini. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi komisi X DPR RI dalam rangka mengembangkan perpustakaan yang lebih optimal di masa yang akan datang." ■

(tuh), Foto: Tiara/hr

Perlu Lapas Khusus Wanita di DIY

Tim Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dipimpin Anggota Komisi III Nasir Djamil. Kunspek kali ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan laporan dari Kapolda DIY, Kakanwil Kemenkumham DIY, dan juga BNNP DIY terkait dengan masalah hukum, HAM dan keamanan di provinsi tersebut, Jumat (09/12).

Ketua Tim Kunspek Nasir Djamil mempertanyakan tentang belum adanya lapas wanita di Provinsi DIY, karena saat ini diketahui lapas wanita masih sangat berdekatan dengan lapas pria.

"Kalau ini masih terjadi kami khawatir bilamana lapas wanita dan pria tersebut berdempetan akan menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan," tuturnya

usai mendengarkan paparan dari Kakanwil Kemenkumham tentang kondisi lapas yang memprihatinkan.

Menanggapi hal tersebut, politisi F-PKS itu mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengalokasikan anggaran 2017 untuk pembangunan lapas khusus wanita. "Kami menginginkan untuk anggaran 2017 segera mengalokasikan anggaran untuk

pembangunan lapas khusus wanita di DIY, karena kondisi lapas yang ada di provinsi ini sudah *over* kapasitas," ujarnya.

Masih kata Nasir, terkait *over* kapasitas pihaknya menghimbau Kakanwil untuk bisa menanggulangi masalah tersebut dengan memindahkan napi ke lapas yang belum *over* kapasitas.

"Karena kalau untuk membangun lapas baru kemungkinan peluangnya kecil.

Nanti kami akan bahas masalah ini dengan mengundang Kemenkumham guna mencari solusi kedepannya untuk segera menganggarkan dana pembuatan lapas baru di DIY," ungkap politikus PKS ini

Legislator dari Dapil Aceh ini juga mengatakan, pihaknya berharap lapas bisa menjadi pembelajaran bagi narapidana yang sudah bebas dari hukuman dan bisa betul-betul menjadi manusia yang menghidupi dirinya dan keluarganya.

"Sebab selama di dalam lapas dia jauh dari masyarakat, keluarga, dan

pekerjaannya, oleh karena itu saya meminta sebelum dibebaskan ke masyarakat, institusi yang terkait harus melakukan pembinaan yang bisa menghidupi para napi. Jangan hanya pembinaan seremonial saja yang dilakukan, sehingga diharapkan dia tidak melakukan perbuatan yang sama lagi," pungkasnya. ■



Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil

Timwas TKI DPR RI Apresiasi Kinerja Gubernur Jatim

Tim Pengawas Tenaga Kerja Indonesia DPR RI mengapresiasi Gubernur Jawa Timur, Soekarwo yang telah memperjuangkan nasib para TKI mulai dari pra penempatan hingga purna penempatan.

“ Kami sangat mengapresiasi Gubernur Jatim dan jajarannya yang telah mengurus nasib TKI semaksimal mungkin. Ini luar biasa, kita sudah coba berdiskusi dan juga melihat Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI. Kami melihat bagaimana pemerintah provinsi memfasilitasi rekrutmen calon TKI, penempatan hingga purna penempatan,” ungkap anggota Komisi I Elnino M. Husein Mohi selaku Pimpinan Timwas TKI DPR

RI ke Jawa Timur, Jumat (29/12).

Lebih lanjut, Elnino mengatakan setelah pulang dari luar negeri, TKI yang ada di Jawa Timur di fasilitasi oleh Pemprov untuk membuka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Memberdayakan masyarakat tidak hanya membuat mereka memiliki *skill* untuk bekerja dan menjadi pengusaha, tidak sampai disitu. Kita harus meniru yang dilakukan Pemprov Jatim setelah pulang mereka difasilitasi untuk membuat UMKM, konsosium bahkan koperasi," tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, kata Elnino, pihaknya akan berkontribusi positif untuk membesarkan UMKM ini, dengan pemerintah. Selain itu, untuk membantu pertumbuhan UMKM, Politisi Fraksi-Gerindra itu berharap adanya peran pemerintah khususnya perbankan BUMN.

"Kita berharap bantuan bank BUMN bisa memberikan kontribusi yang besar untuk membantu ex TKI yang mau berusaha sendiri membangun ekonomi di daerahnya masing-masing. Maka dari itu

UMKM yang ada di Indonesia ini harus

dipermudah dan dibimbing oleh perbankan supaya mereka bisa hidup. Sekarang ini akan terjadi ketimpangan, perekonomian kita ini cenderung pro terhadap pengusaha besar dan tumpul kepada perusahaan kecil," tukasnya.

Elnino juga menjelaskan, tujuan Timwas TKI DPR RI yang merupakan gabungan dari beberapa anggota Komisi mengunjungi ke Provinsi Jatim, untuk mengetahui masalah yang ada namun tidak hanya soal ketenagakerjaan dan teknis pengiriman.

"Ini gabungan dari beberapa komisi sehingga ini tidak bisa dipandang secara komprehensif, bahwa masalahnya tidak hanya soal ketenagakerjaan, dan hanya teknis pengiriman. Tetapi ada masalah yang lebih besar yaitu ekonomi negara ini. Masalah ketenagakerjaan kita perbaiki supaya tidak menyusahkan warga dan juga tidak menyusahkan negara. Ini yang sedang kita usahakan bersama," tuturnya.

Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Elnino didampingi oleh Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka (F-PDIP), anggota Komisi IX Ansory Siregar (F-PKS) dan anggota Komisi V Djoni Rolindrawan (F-Hanura). ■



Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi

Kualitas Perpustakaan Daerah Semakin Baik

Anggota Komisi X DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh menilai dengan adanya UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan berhasil meningkatkan kualitas perpustakaan yang ada di daerah. Hal ini ia apresiasi saat kunjungan kerja spesifik ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sidoardjo, Jawa Timur pada Jumat, (09/12).

Dengan implementasi UU Perpustakaan, sekarang mampu mendorong perpustakaan daerah melampaui perpustakaan di kota besar. Seperti



Anggota Komisi X DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh

Indonesia," terang Kresna. Politisi Nasdem ini menuturkan kebijakan terkait perpustakaan alangkah baiknya jika diterapkan pola *bottom up* agar kebijakan di tingkat pusat sesuai dengan keinginan daerah. "Intinya pada saat kunspek kita dapat masukan, seperti apainginnya dari perpustakaan daerah. Jadi nanti ini akan kita tekan pada Perpustakaan untuk mengikuti pola yang diinginkan oleh daerah. Jadi bagaimana caranya kita bisa melakukan kebijakan itu *bottom up*, jangan *up down*," tuturnya.

Meskipun cukup puas dengan kondisi perpustakaan di Jawa Timur, Kresna berharap agar minat baca di Jawa Timur dapat terus ditingkatkan, sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting guna terus menjadi daya tarik masyarakat untuk

datang ke perpustakaan.

"Kita menginginkan minat baca lebih tinggi lagi, namun jangan dilupakan bahwa sarana prasarana menjadi yang terpenting. Katakanlah di perpustakaan harus ada AC, harus ada ruangan yang nyaman, wifi. Harus banyak sarana prasarana yang ditingkatkan lagi," ujarnya.

Dengan kondisi perpustakaan yang nyaman maka pengunjung tidak akan kecewa untuk datang ke perpustakaan dan suatu saat akan datang kembali lagi. "Sehingga kenyamanan dari yang membaca di Perpustakaan ini tetap terjaga. Mereka tidak kecewa ketika datang sekali, jika perpustakaan itu nyaman maka pengunjung akan datang kembali," tutup Kresna. ■

(bnp) foto: Hendra/ntv

di Kabupaten Sidoardjo ini perpustakaan sudah ada *barcode* untuk mencegah buku hilang, lalu bagaimana caranya mencetak kartu anggota perpustakaan secara langsung. Jadi sangat luar biasa," ujar Kresna kepada Parlemenaria.

Ia pun menilai, sarana dan prasarana di Perpustakaan Sidoardjo sudah cukup memadai, meskipun masih terdapat kekurangan. Hal terkait anggaran pun juga menjadi aspek yang didorong guna meningkatkan kualitas perpustakaan.

"Pastinya kalau terkait dengan sarana sudah cukup memadai, namun sekali lagi kapasitas yang tak bisa dibohongi bahwa perpustakaan ini anggarannya belum terlalu banyak. Jadi mungkin ke depan peningkatan keuangan bisa diperlebar maka akan lebih menarik minat baca masyarakat

DPR RI Serahkan DIM RUU Pemberantasan Terorisme kepada Kemenkumham

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan segera dibahas secara marathon antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Pemerintah. Ini ditandai penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh Pansus DPR RI kepada Pemerintah.

Polri dan TNI Diminta Persempit Ruang Gerak Simpatisan ISIS

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo berharap pemerintah memberikan wewenang penuh dan keleluasaan kepada TNI dan Polri untuk mempersempit ruang gerak simpatisan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

“Pemerintah Indonesia harus belajar dari kegagalan pemerintah Irak dan Suriah dalam melumpuhkan ISIS. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan wewenang penuh dan keleluasaan pada Polri dan TNI untuk mempersempit ruang gerak para simpatisan ISIS di Indonesia. Untuk memperkecil atau melumpuhkan potensi ancaman itu, diperlukan perlakuan hukum yang ekstra tegas terhadap para terduga dan tersangka teroris,” ujar politisi yang akrab disapa Bamsoet ini.

Dilanjutkannya, ketahanan nasional akan terancam jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera ditangkal. Beberapa indikasi sudah terlihat di permukaan. Pertama kecemasan yang sudah disuarakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Keduanya sudah mengemukakan niat ISIS membangun basis di Filipina Selatan untuk mewujudkan kekhalifahan baru di

Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Indikasi kedua terlihat dari kembalinya puluhan simpatisan ISIS yang notabene merupakan warga negara Indonesia (WNI) ke tanah air. Disini politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan tujuan dari kembalinya puluhan simpatisan ISIS tersebut. Apakah ingin menjalani kehidupan normal, atau malah kembali untuk mewujudkan rencana ISIS membangun kekhalifahan di Asia Tenggara?

Dan indikasi ketiga adalah rencana serangan bom bunuh diri ke Istana Negara yang berhasil digagalkan oleh Detesemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror pada Sabtu (10/12) lalu. Polisi berhasil mengamankan tiga orang yang berencana melancarkan serangan bom berdaya ledak tinggi tersebut di Bekasi, Jawa Barat.

Di sini Bambang menilai ada semacam indikasi sel-sel terorisme di



Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo

Indonesia memberi respon positif terhadap rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara. Oleh karenanya ia berharap agar para simpatisan ISIS itu harus segera dilumpuhkan, agar rencana mereka membangun basis di Asia Tenggara tidak dapat terwujud. ■

(Ayu), Foto: Arififor



Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i didampingi Watua menyerahkan DIM kepada Menkum HAM

DIM RUU tersebut diserahkan oleh Ketua Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Muhammad Syafi'i kepada

Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, di Gedung DPR RI, Rabu, (14/12).

Muhammad Syafi'i memaparkan bahwa DIM RUU ini terdiri dari 112 nomor DIM, yang merupakan DIM persandingan dari 10 fraksi yang ada di DPR RI. "Pembahasan DIM akan dilakukan pasal per pasal. Pasal yang tidak mengalami perubahan atau tetap dapat disetujui dalam rapat kerja, namun dapat dibahas kembali dalam rapat panja apabila pasal tersebut terkait dengan pembahasan pasal-pasal yang sedang dibahas dalam panja. Sedangkan pasal yang ada perubahan substansi dan redaksional akan dibahas dalam Panja, Rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini mengharapkan RUU ini tidak seperti UU

sebelumnya yang hanya respon terhadap masalah yang terjadi, tapi benar-benar bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan peningkatan kualitas terorisme.

Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly menyampaikan pendapat pemerintah menyambut baik dan komitmen kepada seluruh fraksi di DPR RI yang telah menyampaikan DIM, dan selanjutnya Pemerintah bersedia melanjutkan pembahasan RUU bersama DPR RI sesuai mekanisme dan jadwal yang disepakati.

"Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang ini untuk dapat menjadi dasar hukum yang baik dalam pemberantasan terorisme," kata Laoly menambahkan. ■

(as), Foto: Jakafor

Diperlukan Cetak Biru Untuk Capai Kedaulatan Pangan

Untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan sesuai dengan amanah UU tentu tidak serta merta dan sederhana, jika tidak ada *road map* atau cetak biru mengenai arahan tentang bagaimana cara untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan itu.

“ Revisi terhadap UU Nomor 12 tahun 1992 tentang Budi Daya Tanaman ini, mungkin saja akan diarahkan kepada sebuah undang-undang yang akan dijadikan format *road map* atau cetak biru sistem pertanian kita kedepan,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron disela-sela acara *Focus Group Discussion* di Universitas Sumatera Utara, Medan, Jum'at (09/12).

Menurut Herman, untuk mencapai swasembada, kedaulatan, dan kemandirian pangan dalam sistem pertanian, ada tiga aspek utama yang harus menjadi bagian pokok didalam sebuah rancangan undang-undang itu. Hal tersebut adalah intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi.

"Ini merupakan instrumen penting untuk menjadi *road map*, agar arahan ataupun jalan untuk menuju kedaulatan pangan ini lebih jelas dan sistematis," tegasnya.

Ia juga mengatakan, dalam sebuah sistem budi

daya tanaman minimal harus terdapat lima aspek, yakni tanah, air, benih, pupuk, dan manajemen tanah. "Kami sudah melakukan pembicaraan tentang bagaimana menyusun draft rancangan undang-undang awal sebagai acuan, untuk itulah Komisi IV DPR RI melakukan *focus group discussion* dengan mengundang para pakar. Susunan penyusunan yang sudah dilakukan, kami

konsultasikan dalam *focus group discussion* di Universitas Sumatera Utara ini," jelas Herman.

Yang tidak kalah penting, lanjut politisi Demokrat ini, adalah mengenai status terhadap tembakau. Tembakau ini akan masuk di dalam grup komoditas apa? apakah di tanaman pangan, tanaman horti atau perkebunan. Apakah juga akan diatur di dalam undang-undang sistem budi daya tanaman yang akan dibahas nanti.

"Para pakar telah memberikan masukan pada sisi-sisi faktor apa yang akan menjadi prioritas sistem budi daya tanaman, dan hal ini akan menjadi suatu acuan bagi berbagai undang-undang komoditas dan sektor lainnya," pungkasnya. ■



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron

Kewajiban Penulis dan Penerbit Kirim ke Perpustakaan Sangat Kecil

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (F-PKS) melakukan kunjungan ke Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/12).

“ Kunspek ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Semarang dan sekaligus menyerap aspirasi dari pustakawan dan pustakawati setempat. Pasalnya, pada Undang-Undang no 4 tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam yaitu kewajiban penulis dan penerbit untuk mengirim 1

buku karyanya ke perpustakaan daerah dan 2 buku ke perpustakaan nasional tetapi kenyataannya sangat kecil ketaatan mereka terhadap undang-undang ini.

Pada saat ini Komisi X DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan (RUU Sisbuk), "Mudah-mudahan banyak hal yang bisa didapatkan untuk RUU Sisbuk ini melalui

kunjungan kerja ini dengan cara menyerap aspirasi dari pekerja setempat," kata Fikri.

Fungsi pendidikan yang paling utama adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan tolak ukur pendidikan suatu bangsa. Semakin baik dan bagus perpustakaan maka semakin cerdas bangsa tersebut. Dewasa ini perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah harus



Tim Kunspek X DPR RI berkunjung ke Badan Arsip dan Perpustakaan di Semarang

merambah ke dunia digital, zaman semakin maju dan modern, banyak orang lebih memilih membaca digital karena lebih cepat dan praktis sehingga minat pembaca bisa lebih meningkat.

Tentang anggaran, Perpustakaan Nasional sekarang sudah lebih mandiri, sedikit demi sedikit sudah dilepas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang semula anggaran perpustakaan dari Rp 300-400 miliar sekarang sudah naik di atas Rp 500 Miliar. "Dalam fungsi pengawasan DPR RI, anggaran semakin naik maka buku dan minat baca harus semakin banyak, bukan semakin banyak korupsi di perpustakaan-perpustakaan," ungkap Politisi Fraksi PKS ini.

Selain ke Jawa Tengah, Tim Kunspek Bidang Perpustakaan Komisi X DPR RI juga mengunjungi Sumatera Utara dan Jawa Timur. ■

(cha,mp), Foto: Chasbi/hr

Komisi IV DPR RI Jaring Pendapat RUU Konservasi SDA dan Ekosistem

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Universitas Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (14/12). Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan ini dalam rangka menjaring pendapat serta menerima masukan tentang RUU Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam menyerap aspirasi, Komisi IV melibatkan segenap civitas akademik Universitas Mataram, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Kami harap para pakar memberikan masukan," ujar Daniel di hadapan para peserta FGD, di aula Kampus Mataram.

Focus Group Discussion ini dalam rangka Konsultasi Publik dan Jejaring Pendapat tentang pembentukan RUU 'Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem'. RUU ini nantinya akan menjamin keberadaan dan keanekaragaman hayati, serta memelihara proses ekologis dan penyangga kehidupan.

Dalam ketentuan umum RUU



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI melakukan FGD dengan para pakar di Mataram

tersebut dijelaskan, konservasi keanekaragaman hayati adalah tindakan perlindungan, pemanfaatan dan pemulihan terhadap keanekaragaman hayati. Lebih lanjut, konservasi keanekaragaman hayati harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

RUU ini dimaksudkan menjamin

kelestarian dan kesinambungan, serta tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilai keanekaragaman hayati. RUU ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang.

Anggota DPR RI Komisi IV yang turut serta dalam menyerap aspirasi ini di antaranya sebagai berikut, dari Fraksi Partai Golkar Bagus Adhi Mahendra Putra, Fraksi

Partai Gerindra Endro Hermono dan Syofwatalillah Mohzaib, dari Fraksi PKB Ibnu Multazam dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin, dari Fraksi PPP Zainut Tauhid, Fraksi Nasdem Hamdani, dan dari Fraksi Partai Hanura Lalu Gede Syamsul Mujahidin. ■

(abo), Foto: Eka/hr

Komisi V DPR RI Tinjau Kesiapan Transportasi Natal dan Tahun Baru di Bali

Kesiapan transportasi dan angkutan umum jelang Natal dan Tahun Baru 2017 di Provinsi Bali mendapat perhatian Komisi V DPR RI. Angkutan darat, udara, dan laut mengalami banyak perubahan teknis seiring lonjakan penumpang menjelang liburan.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mempertanyakan berbagai hal teknis dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Perhubungan Provinsi Bali dan otoritas semua angkutan umum di Denpasar, Selasa (13/12). Menurut Fary, pertemuan ini penting untuk melihat dari dekat sejauh mana sinkronisasi kebijakan transportasi pusat dan daerah.

Perhubungan udara, misalnya, sudah menyiapkan posko terpadu di area-area publik bandara yang dibantu sistem keamanan dari TNI dan Polri.



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis

Ada 1.015 personel yang sudah disiapkan. Gelar kesiapan angkutan umum ini akan berlangsung sepanjang 22 hari, yaitu 18 Desember hingga 8 Januari.

Untuk menghadapi libur Natal dan

Tahun Baru, pihak Angkasa Pura I Bandara Ngurah Rai menambah penerbangan sebanyak 613 *flight* dari berbagai maskapai. Garuda mendapat tambahan 43 *flight*, Air Asia 73 *flight*, Lion Air 132 *flight*, dan sisanya terbagi ke beberapa maskapai lainnya.

Sementara itu, PT. ASDP telah menambah kapasitas kapal angkut di Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbae. Kapal-kapal besar sudah disiapkan untuk menghadapi *peak season* Natal dan Tahun Baru. Loker-loker penumpang ditambah dan personel keamanan TNI/Polri juga ditingkatkan. ■

(mb), Foto: Hasan/br

Hak Pilih TNI, Kemajuan Demokrasi Indonesia

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai pemberian hak suara kepada TNI dalam pemilu merupakan suatu kemajuan bagi demokrasi di Indonesia.

“Itu sebuah kemajuan bagi bangsa kita, bagian dari konsolidasi demokrasi yang progresif,” ungkap politisi F-PKB itu usai RDP dengan Panglima TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/12).

Menurutnya, kesiapan TNI untuk memperoleh hak suara telah ditunjukkan TNI selama menjalankan tugas penting. Apalagi, hampir setiap negara maju telah memberikan hak politik pada tentara nasionalnya.

“TNI berwibawa dalam menangani aksi 2 Desember, terlihat dewasa sekali, kalau sudah seperti itu kenapa tak bergerak lebih maju. Hak pilih tak masalah diberikan sebagai apresiasi kepada TNI yang sudah bersikap netral,” tambahnya.

Sebelumnya, Panglima TNI

Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pemberian kembali hak suara bagi personel TNI bisa dievaluasi usai pemilu serentak 2024. Namun, Pansus menilai sebaiknya evaluasi dilakukan pada pemilu 2019. Alasannya, pemilu 2019 merupakan transisi menuju Pilpres, Pileg dan Pilkada yang akan dilakukan pada Pemilu Serentak 2024.

“Kalau Panglima katakan 2024 dievaluasi, menurut saya evaluasi itu bisa dilakukan di 2019 karena masa transisi itu kan sekarang, untuk mencapai keserantakan sempurna penuh di tahun 2024. Oleh sebab itu, wajar kalau kemudian sudah mulai kita kembangkan evaluasi



Suasana Rapat Pansus RUU Pemilu dengan Panglima TNI, Polri dan Kejaksaan Agung

terhadap hak pilih TNI dan Polri pada 2019,” terang Lukman.

“Nah, kalau dievaluasi tahun 2019 nanti, ternyata masyarakat kita siap, TNI dan Polri juga siap, maka tahun 2024 sudah bisa kita implementasikan,” imbuh politisi dari dapil Riau II itu. ■

(am,mp), Foto: Krema/br

Ketua DPR RI Laporkan Kinerja Dewan Masa Persidangan II

Ketua DPR RI Drs. Setya Novanto, Ak melaporkan kinerja Dewan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 – 2017, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12).

Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR RI bidang Korekku Taufik Kurniawan menjelaskan, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan, yaitu proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung.

Selain itu terkait dengan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI (LPP TVRI) periode 2011 – 2016 yang berakhir masa tugasnya pada 21 Desember 2016, DPR RI mendorong Pemerintah untuk memperpanjang masa tugas Dewan Pengawas LPP TVRI Periode 2011 – 2016 selama 3 bulan.

“Sementara yang masih dalam proses uji kepatutan dan kelayakan adalah calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas, Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap pengangkatan beberapa calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Negara Sahabat,” jelas Novanto.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan lainnya, Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan yang telah melakukan kunjungan kerja ke daerah perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat. Sementara Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan TKI telah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Riau dan NTB.

“Dari seluruh Tim Pengawas yang dibentuk DPR RI, mendapat banyak



Ketua DPR RI Setya Novanto

rekomendasi secara riil merupakan solusi dari banyak temuan lapangan. Hasil temuan ini telah langsung dikonfirmasi dengan pihak Pemerintah yang ikut serta dalam rombongan tim. Selanjutnya, hasil dari kunjungan tim-tim tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Pemerintah, baik melalui Tim maupun AKD terkait,” jelasnya.

Terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017, politisi F-PG itu mengatakan pihaknya mengingatkan Pemerintah agar memperhatikan beberapa hal. Pertama, Pemerintah diminta segera menyelesaikan pencairan hibah sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah ditangani.

“Kedua, melakukan sosialisasi secara intensif dan pengawasan secara optimal terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Dan ketiga, TNI dan Polri perlu berkoordinasi untuk menjaga ketertiban dan meningkatkan rasa aman serta mencegah isu SAR, terutama di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi,” jelas Novanto.

Sementara untuk pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah telah menyetujui dua Rancangan Undang-undang untuk disahkan menjadi Undang-undang yaitu RUU Jasa Konstruksi dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Laut Singapura, 2014.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR dan Pemerintah memiliki komitmen bersama untuk menciptakan *clean and good governance* dalam setiap proses penetapan dan pelaksanaan APBN.

“Untuk itu, DPR RI mengharapkan Pemerintah melakukan *spending review* yang lebih komprehensif pada setiap akhir tahun anggaran, dan hasilnya dapat menjadi pedoman perbaikan kualitas belanja negara,” harap politisi asal dapil NTT itu.

Terkait dengan gempa Aceh, Novanto memastikan, Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi terkait juga telah berkoordinasi untuk melakukan kunjungan dan membawa bantuan yang dapat dikumpulkan segera dari Anggota dan Pimpinan DPR RI. Hal ini dilakukan untuk membantu secara cepat bagi masyarakat yang terdampak gempa.

Menanggapi Aksi Super Damai Umat Islam pada 2 Desember 2016 lalu, DPR RI juga mengapresiasi peserta aksi yang tertib, damai, aman serta terkendali. DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan dalam menjaga aksi tersebut.

“Momen tersebut adalah bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan dewasa, karena tidak mudah jika jutaan manusia berkumpul di suatu tempat dan kegiatan berjalan dengan aman dan damai sampai berakhir. Ini luar biasa,” tutup Novanto. ■

(sf) foto: tim parle/br

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344

 @dpr_ri

 DPR RI

 @DPR_RI

 DPR RI



Wakil Ketua DPR RI
Fahrri Hamzah Nobar
Piala AFF bersama Wartawan
Koordinatoriat DPR RI
di Gedung Nusantara III.
Rabu (14/12)
Foto : Naefuroji/hr

Deputi Persidangan Setjen
DPR RI Damayanti
menghadiri acara
penandatanganan MOU antara
AIPA dan ERIA di Komplek
Parlemen, Senayan,
Jakarta, Jumat(16/12).
Foto : Jayadi



PLT Sekjen DPR RI
Achmad Djuned melantik dua
Pejabat Eselon II YOI Tahapari
dan Helmizar.
Jum'at (16/12) Foto : Jayadi/hr